

PEREMPUAN OMBUDSMAN : PEREMPUAN MASIH MENJADI KAUM TERMARJINALKAN

Minggu, 08 Maret 2020 - Meilisa Fitri Harahap

Padang, Prokabar - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat mengatakan jika selama ini perempuan masih menjadi kaum termarjinalkan dalam berbagai sektor. Hal ini terjadi pada berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, hak-hak dasar, politik, kesehatan dan sektor lainnya.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencatat, sepanjang tahun 2019 terdapat sebanyak 118 laporan dari pelapor perempuan dari total keseluruhan 372 laporan. Adapun saluran yang digunakan oleh pelapor perempuan yang melapor ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat itu yakni sebanyak 94 Pelapor dengan cara datang langsung, 10 Pelapor melalui WhatsApp, 8 Pelapor melalui surat, 3 Pelapor melalui email, 1 Pelapor melalui call center 137, dan 2 Pelapor dengan cara lain-lain.

" Berdasarkan substansinya, tercatat 29 laporan tentang kepegawaian, 27 laporan tentang pendidikan, 13 laporan tentang pertanahan, 12 laporan tentang kepolisian, 6 laporan tentang peradilan, 6 laporan tentang perbankan, dan 6 laporan tentang peradilan,"

Ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani, S.Sos.,M.Si.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain laporan, Ombudsman juga memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2019, tercatat sebanyak 59 konsultasi yang diberikan kepada masyarakat yang berjenis kelamin perempuan, adapun 5 substansi terbanyak yang dikonsultasikan yaitu 8 terkait pendidikan, 7 terkait kepegawaian, 5 terkait kepolisian, 4 terkait pertanahan, dan 4 terkait kepolisian.

" Sebenarnya perempuan bukanlah kaum marginal yang harus pasrah dalam budaya patriarki. Perempuan memiliki kekuatan untuk memberdayakan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Sebut saja Siti Manggopoh, Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahma El Yunus, Mandeh Rubiah dari Minangkabau, dan srikandi-srikandi lainnya dari negeri ini," katanya.

Disamping itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menaungi hak-hak perempuan dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Peringatan Hari Perempuan Internasional setiap tahun pada tanggal 08 Maret menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan eksistensi pencapaian penyeteraan gender oleh perempuan. (rls/eym)